

**PENGARUH PERISTIWA 3 JULI 1946 TERHADAP  
PEMERINTAHAN SJAHRIR DALAM MENEGAKKAN  
KEMERDEKAAN INDONESIA**

**THE INFLUENCE OF THE EVENTS OF JULY 3 1946 ON THE  
SJAHRIR GOVERNMENT IN EFFECTING INDONESIAN  
INDEPENDENCE**

Catur Rahmawati Proboningrum, Subaryana, Suharman  
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,  
IKIP PGRI Wates

**ABSTRAK**

*Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui keadaan pemerintahan Republik Indonesia masa pemerintahan Sjahrir, mengetahui proses terjadinya Peristiwa 3 Juli 1946, dan mengetahui usaha Sjahrir dalam menegakkan pemerintahan Indonesia sesudah Peristiwa 3 Juli 1946. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka atau literatur. Hasil penelitian ini diantaranya setelah Indonesia merdeka banyak sekali tantangan yang dihadapi. Setelah Perang Dunia II selesai, Belanda ke Indonesia dan ingin menguasai kembali bekas jajahannya itu. Dalam upaya menghadapi Belanda terdapat dua aliran yang kuat, yaitu Sjahrir dengan jalan diplomasi dan Tan Malaka dengan Perjuangan Bersenjata dan semboyan merdeka 100 %. Sjahrir diangkat menjadi Perdana Menteri pertama kali di Indonesia, hal ini membuat suasana Indonesia menjadi mencekam karena adanya pertentangan antara pemerintah dan oposisi. Banyak terjadi aksi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia justru menghancurkan kekuatan politik bangsa dalam dunia internasional. Ketegangan pemerintah dengan oposisi mencapai puncaknya dengan adanya coup d'état pada tanggal 3 Juli 1946. Peristiwa itu membuat orang-orang yang dulu berjuang melawan penjajahan berubah status menjadi musuh negara. Para tokoh dari Persatuan Perjuangan ditangkap oleh pemerintah untuk menghentikan aksi mereka. Kegagalan kudeta 3 Juli 1946 membuat Sjahrir terus melakukan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hasil dari usaha Sjahrir adalah Perundingan Linggarjati, tetapi perundingan ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap bangsa. Akhirnya karena banyaknya tekanan dari masyarakat, maka Sjahrir menyerahkan kembali kekuasaan pemerintahan kepada Presiden Soekarno tanggal 27 Juni 1947.*

**Kata Kunci :** Pemerintahan Sjahrir, Persatuan Perjuangan, Peristiwa 3 Juli.

**ABSTRACT**

*This writing aims to find out the state of the government of the Republic of Indonesia during Sjahrir's reign, to know the process of the 3 July 1946 incident, and to know Sjahrir's efforts in establishing Indonesian government after the 3 July 1946 incident. The method used in this writing is library or literature study. The results of this research include that after Indonesia became independent, it faced many challenges. After World War II ended, the Dutch went to Indonesia and wanted to regain control of their former colony. In an effort to confront the Dutch, there were two strong currents,*

*namely Sjahrir with diplomacy and Tan Malaka with Armed Struggle and the motto of 100% independence. Sjahrir was appointed Prime Minister for the first time in Indonesia, this made the atmosphere in Indonesia tense because of the conflict between the government and the opposition. Many actions taken by the Indonesian people have actually destroyed the nation's political power in the international world. The tension between the government and the opposition reached its peak with the coup d'etat on July 3 1946. This event caused people who had previously fought against colonialism to change their status to become enemies of the state. The leaders of the United Struggle were arrested by the government to stop their actions. The failure of the coup on July 3 1946 made Sjahrir continue to carry out diplomacy to maintain Indonesian independence. The result of Sjahrir's efforts was the Linggarjati Negotiations, but these negotiations were considered a betrayal of the nation. Finally, due to a lot of pressure from the public, Sjahrir handed back government power to President Soekarno on June 27 1947.*

**Keywords:**

*Ki Hadjar Dewantara, National Movement, Taman Siswa*

## **Latar Belakang**

### **Metode Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan studi pustaka atau literatur. Langkah-langkah yang digunakan yaitu menentukan topik atau judul, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

## **Pembahasan**

### **Masa Pemerintahan Sjahrir**

Buruknya hubungan pemerintah pusat dan daerah, kedatangan Sekutu, peleburan badan-badan peperangan, pengumpulan kembali orang Jepang, penyesuaian tugas pegawai, buruknya sarana transportasi, dan kemunduran ekonomi menjadi penghalang pemerintah untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Kondisi ini membuat Sekutu sulit untuk mengakui Republik Indonesia karena dianggap sebagai negara buatan Jepang dan berada di bawah kendali Jepang. Kekerasan dan kekejaman yang dilakukan oleh tentara Jepang hampir-hampir menguras habis simpati bangsa Indonesia. Salah satu tokoh anti Jepang adalah Sutan Sjahrir, tokoh anti fasis yang terkenal dengan jaringan bawah tanahnya pada masa pendudukan Jepang. Sjahrir dapat menghilangkan ketidakpuasan pemuda, ia dianggap sebagai orang yang tepat untuk mengatasi masalah dalam masa revolusi. Ia mempunyai hubungan yang baik dengan politisi tua, dan dikenal sebagai

nasionalis intelektual. Di kalangan pemuda, peranannya selama pendudukan Jepang sangat dihargai, dan umurnya yang baru 36 tahun lebih dekat dengan pemuda.

Pada tanggal 7 Oktober 1945, 40 anggota KNIP menandatangani petisi yang berisi tuntutan agar Komite Nasional menjadi badan legislatif, bukan pembantu presiden. Naiknya Sjahrir sebagai ketua KNIP segera membawa angin segar ke dalam KNI dan Pemerintah yang lebih mencerminkan aspirasi rakyat. Berhubung dengan keadaan yang sedang genting, banyak anggota KNIP diperlukan di daerah-daerah, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja. Perubahan status KNIP dapat memperkokoh kedudukan RI dalam menghadapi pihak asing yang menganut paham demokrasi, karena RI dapat dicap sebagai negara fasis buatan Jepang apabila kekuasaan Presiden terlalu besar.

Usaha kedua yang dilakukan Sjahrir ialah mendirikan partai-partai politik. Dengan perubahan status KNIP, maka RI menjadi sebuah negara yang mengikuti pola parlemen Eropa Barat. Sjahrir menjelaskan bahwa pemilihan itu akan bersifat demokratis dan oleh karena itu keikutsertaan partai-partai politik merupakan hal yang utama. Pendirian partai-partai politik dapat menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, suatu bentuk negara yang dikehendaki oleh dunia internasional, terutama oleh Sekutu.

Usaha Sjahrir yang ketiga ialah menulis buku *Perjuangan Kita*. Buku ini merupakan sebuah diagnosa yang dirumuskan secara jernih tentang persoalan yang dihadapi Indonesia pada waktu itu dan merupakan program untuk menghadapi Belanda. Lahirnya kemerdekaan Indonesia diikuti dengan pembentukan kabinet presidensial tidak mampu bertahan lama, karena pada bulan November 1945 kabinet tersebut telah tumbang dan muncul kabinet baru yang bercorak parlementer. Sementara itu Sjahrir yang semula duduk sebagai ketua badan pekerja KNIP telah berhasil menempatkan dirinya sebagai perdana menteri pada tanggal 4 November 1945.

Karena itu dalam meneruskan perjuangan bangsa Indonesia, ia telah menentukan berbagai kebijakan yang tertuang dalam sebuah pamflet berjudul “*Perjuangan Kita*” yang ditulis oleh Sjahrir tanggal 10 November 1945. Menurut Sjahrir, nasib bangsa Indonesia sangat tergantung pada kebijaksanaan politik yang diambil oleh kekuatan-kekuatan imperialis waktu itu. Sehingga satu-satunya jalan untuk menjamin kemerdekaan

Indonesia adalah dengan melalui diplomasi yang lihai dan fleksibel. Pada tanggal 14 November dikeluarkan Maklumat Pemerintah 14 November 1945, yang berisi disetujuinya perubahan sistem kabinet dari presidensial menjadi parlementer.

Sjahrir ditunjuk sebagai formatur kabinet, dan segera membentuk Kabinet Sjahrir I. Ia dianggap sebagai orang yang tepat untuk menjadi pemimpin karena dianggap mampu menghadapi diplomasi dengan negara Barat. Kabinet Sjahrir I sebagian besar anggotanya terdiri atas tenaga pemerintah dan tenaga ahli, bukan politisi dan merupakan orang-orang yang tidak bekerjasama dengan Jepang. Koordinasi semua tenaga rakyat dalam usaha menegakkan Negara Republik Indonesia serta pembangunan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan perikemanusiaan. Perundingan pertama diadakan pada tanggal 17 November 1945, dan menghasilkan usulan-usulan dari pihak Belanda yang intinya berisi mengenai keamanan di Indonesia.

Perundingan selanjutnya diadakan pada tanggal 10 Februari 1946, yang menghasilkan pernyataan politik pemerintah Belanda bahwa Indonesia akan dijadikan sebagai negara persemakmuran di bawah Kerajaan Belanda. KNIP yang masih berada dalam masa sidang segera menyetujui tindakan ini, dan akhirnya Kabinet Sjahrir II dilantik pada tanggal 12 Maret 1946. Dalam kabinetnya yang kedua, Sjahrir tetap melanjutkan perundingan sebagai usaha untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Setelah kabinet baru terbentuk, selanjutnya menyusun usul balasan kepada van Mook, meminta Belanda untuk mengakui kedaulatan penuh Republik Indonesia dengan wilayah bekas Hindia Belanda dan tidak berbentuk sebagai negara persemakmuran seperti yang diusulkan sebelumnya.

Pihak Belanda menolak untuk menerima usul tersebut, van Mook mengusulkan pembentukan negara Indonesia yang berbentuk federasi dalam suatu Uni dengan Belanda. Pada tanggal 27 Maret 1946, Sjahrir memberikan jawaban dengan isi pokok supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan *de facto* RI atas Jawa dan Sumatera, selain itu ia juga menyetujui pembentukan RIS yang berada dalam ikatan Kerajaan Belanda. Selanjutnya Sjahrir menyusun rancangan perundingan yang lebih tinggi tingkatannya. Pihak Belanda hanya bersedia memberikan pengakuan *de facto* kedaulatan RI atas Jawa dan Madura saja, dan itupun dikurangi oleh daerah-daerah yang dikuasai oleh pasukan Sekutu.

Di dalam negeri, posisi Perdana Menteri semakin sulit akibat serangan pihak oposisi yang semakin kuat. Sjahrir sebagai Perdana Menteri untuk yang ketiga kalinya. Pada tanggal 7 Oktober 1946 diadakan perundingan atas dasar program politik pemerintah yang tidak dapat diterima oleh Sjahrir.

Dilihat dari usul yang diajukan oleh kedua belah pihak telah mendekati kesepakatan, maka perundingan dilanjutkan dari Jakarta pindah ke Belanda, bertempat di Hoge Veluwe dari tanggal 23-24 April 1946. Dalam perundingan ini pihak Indonesia diwakili oleh Mr. Soewandi, Mr. A.K. Pihak Indonesia menuntut sekurang-kurangnya pengakuan “de facto” atas Jawa, Madura dan Sumatera. Pada awal 12 November 1946 kedua belah pihak memutuskan untuk melanjutkan perundingan di daerah yang dikuasai RI, agar dapat dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, di kota kecil di pegunungan tidak jauh dari Cirebon, yaitu Linggarjati.

Usul kompromi dan langkah mundur Sutan Sjahrir ini telah menimbulkan ledakan oposisi hebat didalam tubuh RI. Oposisi menolak sepenuhnya diadakannya perundingan dengan pihak Belanda dan berpendapat bahwa Indonesia tidak boleh berunding dengan siapapun sebelum mencapai kemerdekaan seratus persen dan sebelum musuh meninggalkan pantai lautan Indonesia. Indonesia tidak boleh berunding selama musuh masih berada didalam negeri Indonesia. Apa lagi setelah perundingan Linggarjati tersebut dilanggar oleh Belanda sendiri dengan melancarkan agresi militernya yang pertama pada tanggal 20 Juli 1947.

### **Peristiwa 3 Juli 1946**

Kehadiran tentara Sekutu di Indonesia selalu diikuti dengan tindakan-tindakan provokasi yang menyakitkan rakyat bahkan juga melakukan teror dan keributan-keributan terhadap rakyat dan kedaulatan Republik Indonesia. Kemudian BPKNID Yogyakarta mengadakan rapat dan memutuskan untuk mengirim kawat kepada Presiden dan PM Sjahrir yang isinya berupa desakan agar pemerintah pusat dan KNIP segera pindah ke suatu tempat di Jawa Tengah supaya dapat bekerja dengan tenang (Sastrosatomo, 1987:203). Berdasarkan kondisi keamanan Kota Jakarta yang demikian, di mana pemerintah sudah tidak dapat mengkoordinasikan segala aktifitas pemerintahan, maka atas perhatian Pemerintah Yogyakarta terhadap pemimpin-

pemimpin Republik Indonesia, mendorong Presiden Soekarno dan PM. Sjahrir dalam Sidang kabinet pada tanggal 3 Januari 1946 memutuskan untuk memindahkan Ibukota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta.

Pimpinan bangsa dan pimpinan negara Republik Indonesia sebagai perwujudan dari perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia hanya dapat dipertahankan oleh tokoh pemersatu bangsa Indonesia yaitu Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Oleh karena itu Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak hanya diamankan dari bahaya penculikan dan penangkapan, tetapi juga harus diselamatkan dari bahaya luar maupun dari dalam negeri. Kedudukan pemerintah pusat yang terancam, dalam hal ini tentara pendudukan Inggris telah berhasil menduduki dan menguasai gedung- gedung kementerian yang digunakan untuk keperluan tentara pendudukan sehingga kantor-kantor pemerintah pusat harus dipindahkan ke pedalaman (Sastrosatomo, 1987: 202).

Kota Yogyakarta dipilih menjadi ibukota Republik Indonesia karena beberapa alasan diantaranya sebagai berikut: 1. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang secara organisasi dan proses demokrasi pemerintahan dinilai paling maju bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain dari seluruh wilayah Republik Indonesia. Sikap dan peranan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII dalam Revolusi yang sepenuhnya mendukung pemerintah pusat (Sastrosatomo, 1987: 203) Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pada tanggal 4 Januari 1946 Ibukota Republik Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta, di kota tersebut pemerintah mempunyai harapan untuk melanjutkan perjuangan. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualaman VIII dengan dukungan seluruh rakyat dinilai mampu memberikan perlindungan keamanan sehingga pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik.

Raja Yogyakarta tidak memperdulikan tahta dan kehormatan yang mungkin akan hilang, serta keselamatan yang terus mengancam karena memihak Republik, bukan Belanda (Sardiman AM, dalam Kedaulatan Rakyat 4 Januari 2013). Dengan pindahnya ibukota Republik Indonesia ke Yogyakarta berarti pemerintah masih mampu mengkonsolidasikan kedudukan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka baik secara politik maupun secara administratif organisatoris. Di samping kementerian

baru yaitu Kementerian Penerangan dan Kementerian Pertahanan yang sejak berdirinya berkantor di Yogyakarta maka dengan pindahnya Ibukota Republik Indonesia ke Yogyakarta, kantor-kantor kementerian yang berkedudukan di Jakarta yang sejak akhir bulan Desember 1945 telah dikuasai oleh Sekutu ikut pindah juga ke pedalaman yang tersebar di seluruh daerah-daerah. Sejak ibukota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta, maka sejak saat itu kota Yogyakarta mempunyai andil yang besar dalam perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Perbedaan strategi dan taktik perjuangan antara pemerintah Perdana Menteri Sjahrir dan Tan Malaka sebagai pihak oposisi telah melahirkan perpecahan di antara keduanya. Ketidakpuasan dan kegagalan politik diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah mendorong lahirnya Persatuan Perjuangan (PP) yang dipimpin oleh Tan Malaka. Pada saat itu fikiran dan pandangannya menjadi pokok yang utama dalam kalangan oposisi. Melihat adanya perpecahan dalam laskar-laskar perjuangan, partai-partai politik dan berbagai bentuk badan-badan perjuangan, maka ia memutuskan untuk mengundang mereka semua yang ada dengan maksud membentuk suatu kerjasama dalam satu “federasi” yang sebebaskan mungkin dan selekas mungkin dalam satu program perjuangan.

Menurut Tan Malaka, Kongres Pertama Persatuan Perjuangan itu dihadiri oleh 138 organisasi (Partai, Tentara, Laskar dan Badan Perjuangan). Dalam kesempatan itu Tan Malaka mengajukan 7 pasal Minimum Program untuk dipelajari selama 10 hari. Tetapi Minimum Program yang diajukan Tan Malaka itu baru diterima dalam Kongres kedua Persatuan Perjuangan (PP) yang berlangsung di Solo pada tanggal 16 Januari 1946 dan dihadiri oleh 141 organisasi. Minimum Program yang terdiri dari 7 pasal itu adalah : Tan Malaka (2000:183) menyebutkan, sebelum kedua Kongres Persatuan Perjuangan itu, juga dikirimkan undangan kepada Presiden dan Wakil Presiden (Ir. Soekarno dan Moh. Hatta). Persatuan Perjuangan (PP) dengan Minimum Programnya telah mewujudkan kekuatan dan suara yang bulat dari semua partai dan rakyat yang revolusioner anti imperialisme, kapitalisme. Persatuan antara partai dan partai, serta diantara PP dengan pemerintah sangat diharapkan untuk melawan imperialis.

Politik yang dijalankan oleh Tan Malaka sangat bertentangan dengan politik Sjahrir. Politik Tan Malaka mengambil jalan perjuangan bersenjata secara fisik,

sedangkan politik Sjahrir lebih mengutamakan diplomasi dengan pihak penjajah Belanda maupun Sekutu. Oposisi makin tajam ketika pada sidang KNIP di Solo tanggal 25–28 Februari 1946 yang mengakibatkan jatuhnya kabinet Sjahrir yang pertama. Pada sidang KNIP di Solo tersebut Persatuan Perjuangan menuntut supaya Sjahrir membentuk kabinet atas dasar Minimum Program 7 pasal PP.

Sutan Sjahrir menolak minimum program 7 pasal tersebut dan sebaliknya mengajukan program 5 pasal yang tidak disetujui PP. Wakil Presiden Mohammad Hatta mengumumkan bahwa Sutan Sjahrir telah ditunjuk kembali sebagai formatur sebuah kabinet baru yang diharapkan merupakan suatu kabinet koalisi. Pada sore harinya diumumkan bahwa kabinet baru ini akan bekerja atas dasar program 5 pasal yaitu; Akibatnya PP tidak mau menerima program tersebut dan tidak mau duduk dalam kabinet, padahal pemerintah sangat memerlukan dukungan guna melaksanakan perundingan dengan pihak penjajah Belanda. Usaha untuk membungkam oposisi yang menentang perundingan dengan Belanda, pemerintah pada tanggal 17 Maret 1946 menangkap orang-orang PP diantaranya Tan Malaka beserta enam pemimpin penting dari Persatuan Perjuangan yaitu Sukarni, Suprpto.

Dalam penangkapan itu, selain tokoh-tokoh tersebut di atas, ditangkap pula dua orang penasihat Panglima Besar Jenderal Soedirman yaitu Iwa Koesoema Soemantri dan Ahmad Soebardjo, juga Muhammad Yamin. Penahanan itu dilakukan oleh pemerintah atas dasar pertimbangan demi menghindari timbulnya kegelisahan dan kekacauan dalam masyarakat, atau perpecahan tersebut menimbulkan reaksi diantaranya berupa kecaman terhadap pemerintah karena penahanan itu berarti pemberangusan kebebasan berkumpul dan berbicara.

Pidato wakil presiden Mohammad Hatta menerangkan bahwa pemerintah menuntut pengakuan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera. “Semua yang hadir kaget dan tidak mengerti akan isi pidato Bung Hatta itu, sedangkan Panglima Besar Soedirman tampak menunjukkan sikap yang tidak setuju karena dia tampak menggeleng-gelengkan kepalanya”. Pada tanggal 27 Juni 1946 sore, Jenderal Soedarsono mengeluarkan sebuah surat perintah untuk dilaksanakan oleh Mayor A. K Yusuf untuk menangkap Perdana Menteri Sjahrir dan teman-temannya: Soedarsono, Abdul Majid, Darmawan Mangunkusumo, Soedibyo, dan Dr. Sumitro.

Dengan surat itu berangkatlah Perwira tersebut ke Solo, di mana Perdana Menteri ketika itu sedang berada. Diketahui kalau Sjahrir pada malam 27 Juni 1946 akan bermalam di Solo dari perjalanan keliling Jawa Timur, ditemani Dr. Sudarsono, Mayjend Soedibyo, dan Sumitro Djyohadikusumo (M. Yuanda Zara, 2009:228).

Pada pukul 01. 00 Mayor A. K Yusuf pergi ke gedung Javasche Bank, tempat Perdana Menteri Sjahrir menginap dengan diantar oleh rombongan polisi tentara Solo. Mayor A. K Yusuf menyampaikan tugasnya untuk menangkap Perdana Menteri Sjahrir dengan memperlihatkan surat perintah dari Panglima Divisi III. Mula-mula Sjahrir menolak permintaan Yusuf, tetapi setelah Yusuf menunjukkan surat perintah dari Komandan Divisi III, akhirnya Sjahrir dan kawan-kawan (Soedarsono, Abul Majid, Darmawan Mangunkusumo, Soedibyo, dan Dr. Sumitro) tunduk. Selain Perdana Menteri Sjahrir terdapat pula Menteri Perdagangan dan Industri Ir. Darmawan Mangunkusumo serta Jenderal Mayor Soedibyo dan Dr. Sumitro. Adapun tujuan dari kaum oposisi menculik Perdana Menteri Sjahrir ialah memaksa Pemerintah untuk meninggalkan politik perundingan dan menggantinya dengan politik perang dan kemudian membentuk negara menurut kemauan mereka (Sutrisno Kutoyo, 2004: 192). Keadaan menjadi genting dan rakyat tampak gelisah, setelah mendengar tentang penculikan terhadap Perdana Menteri Sjahrir.

Sesuai dengan rencana, maka pada tanggal 28 Juni 1946 diadakanlah sidang kabinet di Istana. Rapat memutuskan supaya Presiden mengucapkan pidato radio yang meminta kepada semua golongan rakyat untuk membantu mengembalikan Perdana Menteri. Pada hari itu juga tanggal 28 Juni 1946 sesuai dengan keputusan sidang Kabinet Presiden Soekarno menyatakan seluruh Indonesia dalam keadaan bahaya dan kekuasaan sepenuhnya berada kembali dalam tangan presiden. Kemudian pada tanggal 29 Juni 1946 dikeluarkanlah maklumat Presiden No. 1 tahun 1946 yang berbunyi: Berhubung dengan kejadian-kejadian dalam negeri yang membahayakan keselamatan negara dan perjuangan kemerdekaan kita, maka kami Presiden RI dengan persetujuan kabinet dalam sidangnya pada tanggal 28 Juni 1946 mengambil kekuasaan pemerintah sepenuhnya untuk sementara waktu sampai kembalinya keadaan biasa yang memungkinkan kabinet dan lain-lain badan resmi bekerja sebagaimana mestinya. Soekarno, Hatta dan Amir menuduh Soedirman tahu di mana Sjahrir dan kawan-kawan (Soedarsono, Abul Majid

Darmawan Mangunkusumo, Soedibyo, dan Dr. Sumitro) disembunyikan dan mendesak agar Panglima Besar Soedirman membantu membebaskannya.

Soekarno menghendaki Soedirman menangkap Soedarsono tetapi ia menolak untuk berbuat sesuatu, karena pembebasan Sjahrir tidak harus disertai pembalasan, termasuk penangkapan bukan saja Soedarsono tetapi juga Sutarto, apalagi kalau yang mereka inginkan sebenarnya adalah kemerdekaan Indonesia 100% (G. Moedjanto, 1992: 147 – 175). Melalui pidato radio Presiden Soekarno meminta dibebaskannya Perdana Menteri Sjahrir yang dianggap peranannya sangat menentukan bagi perjuangan bangsa. Memenuhi permintaan Presiden Soekarno, Perdana Menteri Sjahrir dibebaskan pada tanggal 30 Juni 1946 malam masuk 1 Juli 1946, dan selamat tiba di Yogyakarta, kemudian Perdana Menteri Sjahrir terus pergi ke Jakarta. Sementara itu di Yogyakarta pula pada hari Selasa tanggal 2 Juli menjelang Rabu 3 Juli 1946 berlangsunglah suatu perkembangan lain sebagai rekasi terhadap penangkapan orang-orang PP. Dengan diculiknya Perdana Menteri Sjahrir oleh kelompok oposisi, maka kabinet Sjahrir yang kedua jatuh.

. Pada tanggal 1 Juli 1946 Jenderal Soedarsono bertemu dengan Panglima Besar Soedirman di Loji Gandrung Solo. Menurut pengakuan Soedarsono dimuka pengadilan 3 July Affair, bahwa Panglima Besar Soedirman memerintahkan kepadanya agar para tahanan dibebaskan, kemudian mempertemukan mereka dengan presiden dan menuntut pertanggungjawaban atas penahanan mereka serta razia 17 Maret 1946 (yang antara lain menyebabkan penangkapan Tan Malaka) serta menuntut pembaharuan kabinet. Setelah menghadap Panglima Besar Soedirman segera Soedarsono dengan diikuti oleh Yusuf dan Yamin kembali ke Yogyakarta. Kepada Kepala penjara mereka mengaku mendapat perintah dari Panglima Besar Soedirman untuk membebaskan para tahanan.

Kemudian mereka diangkut oleh Mayor A.K Yusuf ke Wiyoro, kecuali Mohammad Shaleh yang turut dengan Soedarsono untuk diminta menyiapkan laskar rakyat guna melakukan tindakan selanjutnya yang akan diperintahkan (M. Yuanda Zara, 2009:143). Di Wiyoro ini dalam suatu ruangan atas permintaan Panglima Divisi III Jenderal Soedarsono, dibuatlah 4 helai rencana maklumat oleh Mohammad Yamin, Soebardjo, Budhyarto, dan Khaerul Shaleh.

Pada malam itu dilakukan lagi beberapa tindakan oleh Soedarsono, diantaranya

yaitu menawan Sumarsono dan Subekti di resimen Soeharto di Wiyoro, memerintahkan kepada Panglima Divisi Laskar di kota Yogyakarta untuk mengumpulkan anak buah pada pukul 07. 00 WIB. di Alun-alun Lor. Ia juga menerima gagasan Yusuf untuk mendatangkan Tan Malaka, Sukarni dan Iwa dari Tawangmangu dan mengkonfrontasikan mereka dengan Soekarno, tetapi hubungan telepon dengan Komandan Yon di sana terputus, sehingga pada saat terjadi *coup de etat* Tan Malaka dan Sukarni masih terkurung disana.

Pada pukul 05. 30 itu telah tiba truk dari Mayor A. K Yusuf dengan regunya di depan rumah Menteri Amir Syarifuddin. Kira-kira mereka tiba di Istana pada pukul 07.00, namun di Istana sudah hadir Wakil Presiden dan Menteri Amir Syarifuddin. Kemudian Panglima Divisi III Jenderal Soedarsono diperkenankan menghadap presiden sendirian dan tidak boleh membawa senjata. Jenderal Soedarsono segera menyampaikan maksudnya bahwa atas perintah Panglima Besar Soedirman ia akan menyerahkan 4 helai maklumat untuk ditandatangani, yakni maklumat-maklumat yang telah dibuat tadi malam di Wiyoro. Sebelum terjadinya peristiwa 3 Juli 1946 tersebut, sebenarnya banyak perwira-perwira bekas Yugeki (yang dipimpin oleh kolonel Zulkifli Lubis) yang sudah mengetahui rencana tersebut dan selalu melaporkan setiap perkembangan usaha tindakan “makar” tersebut kepada Presiden melalui ajudannya, yaitu Mayor Pamoe Rahardjo seorang perwira asal “Yugeki” PETA, sehingga pada tanggal 2 Juli 1946 dengan persetujuan Panglima Besar, didatangkan satu batalyon dari Divisi VII Imam Soedjati dengan para komandannya antara lain Mayor Soedjanudji dan kapten Sumeru yang bertugas khusus ikut menjaga istana dan Kepala Negara serta MBT (Markas Besar Tentara).

Pada pukul 13. 30 Kolonel Zulkifli Lubis memerintahkan Kapten Koesno Wibowo untuk menemui ajudan Presiden, Pamoe Rahardjo dengan pesan “Besok pagi akan ada pasukan di depan Istana, dan Komandannya akan membawa tamu-tamu “kaum politisi”, Bapak Lubis memerintahkan agar semua tamu-tamu tersebut ditangkap begitu masuk, ini tindakan makar” (Tjokropranolo, 1993: 86). Adapun penyelesaian yuridis terhadap mereka yang tersangkut dalam peristiwa 3 Juli 1946 disidangkan dari tanggal 8 Maret hingga 29 Mei 1948 oleh Mahkamah Tentara Agung Republik Indonesia di Yogyakarta.

Dalam sidang 3 July Affair tersebut Jaksa Agung Tentara menuntut hukuman bagi masing-masing terdakwa: Soedarsono dan Moh. Yamin 12 tahun penjara; Mr. Subarjo dan Mr. Budhyarto 8 tahun penjara; Mr. Iwa Kusuma Sumantri dan Dr. Kemudian pada tanggal 29 Mei 1948 Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara bagi Soedarsono, Moh. Yamin, dan A. K. Yusuf; Mr. Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri 3 tahun penjara; Mr. Budhyarto dan Moh. Saleh 2 tahun 6 bulan penjara; Dr. Buntaran 2 tahun penjara; masing-masing dipotong selama dalam tahanan.

### **Usaha Sjahrir Dalam Menegakkan Pemerintahan Indonesia Sesudah Peristiwa 3 Juli 1946**

Pemerintah menilai peristiwa 3 Juli 1946 merupakan usaha perebutan kekuasaan secara paksa, *atau coup d'etat* untuk menggulingkan kepemimpinan Soekarn-Hatta dan menggantikan Perdana Menteri Sjahrir dengan Dewan Pimpinan Politik. Kasus ini disidangkan oleh Mahkamah Tentara Agung dari tanggal 8 Maret 1948 hingga 27 Mei 1948 (M. Yuanda Zara, 2009:224). Saat itu, Soedirman juga hadir sebagai saksi dan memberikan kesaksiannya yang memberatkan Jenderal Mayor RP Soedarsono, karena tidak dapat membuktikan adanya perintah tertulis atau persetujuan tertulis dari Soedirman kepadanya untuk melakukan *Coup d'etat* tersebut (R. Abdulgani, dkk, 2004:76). Tindakan selanjutnya ialah pada tanggal 30 Juni 1946 presiden mengucapkan pidato radio yang isinya: (1) menyatakan negara dalam keadaan darurat, (2) presiden segera akan memimpin sidang kabinet darurat, (3) melakukan berbagai usaha pencairan PM Sjahrir dan rekan-rekannya yang tengah diculik, (4) mengirim kawat ke Jakarta yang berisi permintaan penghentian tembak menembak secara umum dan supaya Belanda tidak menggunakan situasi kritis itu untuk melakukan serangan terhadap RI, (5) menyerukan kepada seluruh rakyat bahwa demi nama baik Indonesia mereka yang menculik Sjahrir segera untuk melepaskannya kembali (G. Moedjanto, 1988:173). Sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan politik diplomasinya maka, diadakanlah perundingan dengan pihak Belanda (Rudolf Mrazek, 1996:570).

Sebelum Perjanjian Linggarjati dilaksanakan, telah digelar rangkaian perundingan di Jakarta maupun Belanda, Pertemuan pertama dilangsungkan pada 23 Oktober 1945 di Jakarta oleh perwakilan RI dan NICA. A.H. Nasution dalam buku *Sekitar Perang*

Kemerdekaan: Periode Linggarjati (1994:111), mengungkapkan bahwa perjanjian tersebut telah disepakati melalui rumusan naskah persetujuan pendahuluan yang ditandatangani oleh Sutan Sjahrir dan Hubertus van Mook (Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir) pada 30 Maret 1946. Sedangkan Indonesia menghendaki kedaulatan penuh, dan Federasi Indonesia- Belanda hanya akan dilaksanakan pada masa tertentu (center for information analysis,2000: 11)

Setelah peristiwa 3 Juli 1946, Sjahrir memulai kembali diplomasinya. Belanda membuat Komisi Umum yang dikhususkan untuk memimpin perundingan Indonesia-Belanda dengan ketua Profesor Willem Schermerhorn (Rudolf Mrazek, 1996:579). Sidang pleno pertama perundingan Indonesia-Belanda dilakukan tanggal 7 Oktober 1946, dalam sidang tersebut dihadiri oleh pihak Indonesia yang dipimpin PM Sjahrir dan di pihak Belanda dipimpin oleh Schermerhorn. Tanggal 13 November 1946 delegasi Belanda diundang Soekarno untuk makan malam, tetapi Sjahrir tidak hadir dalam acara tersebut karena kepalanya sakit. Dalam pertemuan itu terjadi pembicaraan ringan, tiba-tiba Soekarno memberikan pidato singkat dan terjadilah persetujuan sementara yang terkenal dengan persetujuan Linggarjati, yang kemudian di paraf tanggal 15 November 1946 di rumah Sjahrir. Jika terjadi perselisihan, maka masalah diserahkan pada komisi arbitrase untuk pemecahannya (G. Moedjanto, 1988:182)

Persetujuan Linggarjati sudah tercapai tetapi belum bisa dilaksanakan, karena hasil persetujuan ini harus diratifikasi oleh parlemen masing-masing. Adanya persetujuan Linggarjati, berarti Belanda sudah menerima politik dekolonisasi yang dikehendaki Belanda, yaitu dekolonisasi dengan kepentingan-kepentingan Belanda tetap terjamin dalam negara Indonesia di masa depan. Pembatasan-pembatasan itu berupa menghapus kekuatan militer Republik, meniadakan kegiatan diplomatik Republik di luar negeri, membentuk negara Indonesia Serikat sedangkan Republik hanya merupakan satu negara bagian, dan pembentukan Uni Belanda-Indonesia, yang dipimpin oleh Mahkota Belanda, sehingga Belanda dapat turut menentukan kebijakan politik Indonesia (AB Loebis, 1995:213).

Semua keinginan Belanda sejak semula ditolak, hingga menjelang penyerangan Belanda pada tanggal 21 Juli 1947. Usaha yang dilakukan Belanda selain untuk menambah hal-hal yang baru pada naskah persetujuan itu, mereka juga melancarkan

serangan-serangan militer terhadap berbagai daerah di Republik Indonesia seperti di Bogor, Sidoarjo dan Irian. Sikap Republik yang tidak pernah melepaskan pendiriannya bahwa Republik meliputi seluruh wilayah Indonesia, dan tidak bersedia melepaskan identitasnya sebagai negara dengan menerima tuntutan-tuntutan Belanda

Parlemen Belanda baru akan memberikan persetujuannya setelah berhasil diyakinkan bahwa hasil persetujuan Linggarjati masih bersifat sementara, jadi masih akan diadakan pengaturan lebih lanjut yang menyangkut hubungan Indonesia dan Belanda. Ini disebabkan golongan konservatif yang takut kehilangan Indonesia dan golongan tersebut sangat kuat suaranya di parlemen Belanda (Ide Anak Agung, 1983:135). KNIP menganggap bahwa persetujuan Linggarjati terlalu menguntungkan Belanda, disamping itu juga tidak sesuai dengan perjuangan bangsa Indonesia yang menghendaki kemerdekaan seratus persen. Mengenai masalah ini Sutan Sjahrir menyatakan harapannya agar naskah persetujuan Linggarjati dapat diterima (Lapian, 1992:4). Beberapa partai politik yang berada dalam parlemen yang menentang persetujuan Linggarjati diantaranya Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Angkatan Komunis Muda (ACOMA), Partai Wanita, Partai Rakyat Indonesia (PARI), Laskar Jawa Barat, dan Partai Rakyat Jelata. Sedangkan yang mendukungnya ialah PKI, BTI, Pesindo, Partai Buruh, Parkindo, dan Partai Katholik (Nugroho Notosusanto, 1993:133)

Pertentangan tersebut mengharuskan Presiden Soekarno ikut turun tangan, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6 tanggal 29 Desember 1946. Dengan demikian akan memunculkan kekuatan yang pro perjanjian Linggarjati semakin besar, sehingga sah untuk diadakan ratifikasi (Nugroho Notosusanto, 1993:212). Karena ancaman tersebut maka partai-partai yang menentang Linggarjati terpaksa mengalah, mereka tidak mampu menemukan pemimpin yang lebih baik untuk menduduki jabatan presiden dan wakil presiden selain Soekarno dan Hatta, yang pada masa revolusi merupakan dwi tunggal yang berwibawa (Ide Anak Agung, 1995:222). Pengesahan ini disaksikan oleh peninjau-peninjau Amerika, Inggris dan Vatikan di Istana Negara Riswijk (Ide Anak Agung, 1995:233). Secara garis besar, walaupun perjanjian ini tidak memuaskan kedua belah pihak baik Indonesia dan Belanda, namun hasil keputusan Linggarjati ini sedikit banyak telah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia ketika pertama kali berkeinginan menjalankan strategi perjuangan politik diplomasi.

Disahkannya persetujuan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947, merupakan bukti keberhasilan Sjahrir sebagai perdana menteri Indonesia yang memimpin perjuangan melalui meja perundingan dengan bangsa Belanda. Sedangkan pihak RI juga mengeluh terhadap Belanda yang terus menjalankan aksi separatismenya, dan bantuan Belanda kepada Partai Rakyat Pasundan yang memelopori pendirian Negara Pasundan pada 4 Mei 1947 di Linggarjati, serta diperkuatnya tentara Belanda di wilayah Indonesia yang seharusnya ditarik mundur dari RI (G. Moedjanto, 1988:185). Pada tanggal 27 Juli 1947 Sjahrir menyerahkan mandatnya kepada presiden, sehingga berakhir pemerintah Sjahrir dalam negara Indonesia (Rudolf Mrazek, 1996:614). Rushdy Hoesein (2010:67) mengutarakan bahwa jatuhnya kabinet Sjahrir III disebabkan karena pertama, kekuatan di dalam sayap kiri sendiri, yaitu teman-teman dekan Sjahrir sesama partai sosialis. Dari 17 pasal yang dibahas, *deadlock* terjadi pada pasal mengenai pembentukan Negara Indonesia Serikat (Arif Zulkifli, 2010:92).

Faktor yang kedua adalah tidak menentunya perundingan Indonesia-Belanda pasca persetujuan Linggarjati. Dalam pidatonya ia bersedia mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia, dalam rangka melaksanakan persetujuan Linggarjati, dan menanggapi positif tuntutan Belanda 27 Mei 1947 sebagai-berikut: Point tersebut jelas sekali bahwa Belanda secara tidak langsung ingin menguasai daerah Republik dengan kekuatan militernya yang ditempatkan di daerah Indonesia.

Desakan-desakan itu yang membuat Sjahrir merasa tidak mampu lagi untuk memimpin bangsa dan akhirnya meletakkan jabatannya. Diplomasi telah seringkali dilakukan oleh Sjahrir, sekalipun hal itu membahayakan nyawanya sendiri karena pihak oposisi yang bergitu kuat menentanginya. Hal itu tidak menjadikan semangatnya turun untuk terus mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.

#### **Daftar Pustaka**

- Abu Bakar Loebis. 1992. *Kisah Balik Revolusi Kenangan, Pelaku dan Saksi*. Jakarta: UI Press
- A.H Nasution. 1978. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 4 : Periode Linggarjati*, Bandung: Angkasa Bandung.
- Arif Zulkifli, dkk. 2010. *Sjahrir; Peranan Besar Bung Kecil*. Jakarta: Gramedia.
- G Moedjanto. 1992. *Indonesia Abad ke-20 Jilid I*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gde Agung Ide Agung. 1983. *Renvile*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Lapian A.B. dan Dronglover P.J. 1992. *Menelusuri Jalur Linggarjati*. Jakarta: Pustaka

Utama Grafiti.

- M. Yuanda Zara. 2009. *Peristiwa 3 Juli 1946: Menguak Kudeta Pertama dalam Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Rudolf, Mrazek. 1996. *Sjahir Politik dan Pengasingan di Indonesia* (Terj. Mochtar Pabotingi, Matheos Nalle, S.Maimoen Jakarta: Obor.
- Rushdy Hoesein. 2010. *Terobosan Soekarno dalam Perundingan Linggarjati*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sardiman AM dalam *Kedaulatan Rakyat* tanggal 4 Januari 2013.
- Soebadio Sastrosatomo. 1987. *Perjuangan Revolusi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Sutrisno Kutoyo. 2004. *Prof. H. Muhammad Yamin SH; Cita-cita dan Perjuangan Seorang Bapak Bangsa*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Tan Malaka. 2000. *Dari Penjara Ke Penjara Jilid III*. Jakarta: Teplok Pres.